



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Maret 2017

Halaman: 2

DAMPINGI KPU KOTA YOGYA DI MK KPU DIY Siap Adu Bukti

YOGYA (KR) - Jajaran komisioner KPU DIY bakal turut mendampingi KPU Kota Yogya yang akan mulai bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini Jumat (17/3). Pihaknya juga siap adu bukti sepanjang diperlukan lantaran menilai para penyelenggara sudah menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai prosedur.

"Kami sudah mengirimkan divisi hukum untuk ke Jakarta sejak 14 Maret 2017 lalu. Meski yang termohon adalah KPU Kota Yogya, namun kami turut memberikan koordinasi dan asistensi. Bahkan KPU RI juga melakukan hal sama sebagai tanggung jawab bersama," papar Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, Kamis (16/3).

Hamdan menilai, seluruh tahapan penyelenggaraan Pilwali Yogya, pelaksanaannya cukup kondusif. Pihaknya pun memberikan apresiasi terhadap kedua tim pasangan calon dan pendukungnya serta KPU Kota Yogya selaku penyelenggara. Sedangkan terhadap hasil yang tidak memberikan kepuasan bagi salah satu pihak, tetap disediakan ruang berupa pengajuan permohonan

ke MK tersebut.

Kendati demikian, KPU DIY tidak ingin memberikan kesimpulan terhadap proses persengketaan yang diajukan kubu pasangan Imam-Fadli. Begitu pula menyangkut peluang pembukaan kotak suara tidak sah atau pemungutan ulang.

"Kami siap adu bukti, dokumen serta saksi. Tahapan sidang masih cukup panjang, ditunggu saja prosesnya di pengadilan. Besok (hari ini) baru sidang pendahuluan guna memaparkan permohonan pemohon," urainya.

Sesuai tahapan, setelah sidang pendahuluan akan dilanjutkan pada 20-24 Maret 2017 berupa jawaban termohon serta keterangan pihak terkait. Setelah itu pembaa-

hasan perkara pada 27-29 Maret, dilanjutkan sidang pleno 30 Maret-5 April. Sedangkan pembuktian pemohon, termohon dan pihak terkait baru digelar pada 6 April-2 Mei 2017. Kemudian tahapan terakhir ialah putusan sela dan putusan akhir pada 10-19 Mei 2017.

"Proses sidang itu akan kami ikuti seluruhnya. Sehingga kami tidak ingin mendahului. Namun yang jelas, semua alat bukti juga kami anggap penting serta siap untuk diadu dengan bukti dari pemohon," tandasnya.

Terkait perkembangan terakhir, menyangkut dilaporkannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Danurejan, Umbulharjo dan Gondokusuman ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menurut Hamdan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara di MK. Apalagi laporan itu masih bersifat dugaan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, pihaknya juga akan menghormati proses yang nanti akan dijalankan oleh DKPP. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005